



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4 Kabupaten/Kota Raih WTP

YOGYA (MERAPI) - Empat kabupaten/kota di DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Kulonprogo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilansir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, Kamis (22/5). Sementara, Kabupaten Gunungkidul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Khusus untuk Kota Yogyakarta, tahun ini WTP disertai dengan paragraf penjelasan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan pada pengelolaan Education Hotel (Edotel).

"Masih seperti dulu, WTP dengan paragraf penjelasan. Harusnya ada perubahan," kata Kepala Kantor Perwakilan BPK DIY Sunarto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kabupaten dan kota di kantor BPK DIY, Kamis (22/5).

Dia menjelaskan pada pengelolaan Edotel di SMKN 4 dan SMKN 6 Yogyakarta, penerimaannya belum dimasukkan dan langsung digunakan untuk belanja. Termasuk juga pada pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

BPK juga memberikan catatan terkait aset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya. Piutang-piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) pelimpahan KPP Pratama yang sudah diverifikasi yang belum dimasukkan juga jadi sorotan.

Selain itu gugatan perdata terkait keputusan kontrak sepihak atas kerja sama Bangun guna serah Terminal Giwangan. Catatan ini sama dengan

yang diberikan BPK pada LKPD Pemkot APBD 2012. "Menghadapi gugatan ini sudah bertahun-tahun. Kami sarankan Pemkot Yogya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar tahun depan bisa meraih WTP murni tanpa paragraf penjelasan," papar Sunarto.

Terkait dugaan korupsi pengadaan pergola yang sedang diproses Kejaksaan Tinggi, Sunarto mengatakan tidak mempengaruhi predikat WTP. Ini karena dari sisi laporan keuangan dan pertanggungjawaban semua lengkap sudah dilaporkan Pemkot Yogya. Namun dari asas kepatuhan pelanggaran bisa masalah itu muncul karena pengadaan pergola dilakukan dengan penunjukkan langsung dan spesifikasinya tidak sesuai.

"Berdasarkan data laporan keuangan kami ungkap di situ. Tapi kita tidak menghitung kerugiannya. Kejaksaan yang berhak menyelidiki lebih dalam, mereka punya data lebih kuat. Kami tidak ingin mengganggu proses, itu tapi pada intinya kita bekerja sama," terang Sunarto.

Menanggapi hal ini Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastru mengatakan masalah Edotel selama ini masih masuk anggaran pendataan belanja sekolah.

Belum dimasukan karena akan terkendala dalam operasional hotel jika penerimaan harus masuk kas daerah. Untuk mengatasinya kini dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Ini masih proses pembentukan BLUD. Kalau dibuat BLUD bisa dibuat rekening sendiri sehingga tidak ada kendala dalam belanja operasional," tambah Titik yang hadir mewakili Pemkot Yogya.

Sedangkan Rusunawa di Juminahan aset itu baru diserahkan pemerintah pusat ke Pemkot Yogya kemarin, sehingga belum masuk ke kas daerah.

"Untuk yang masalah gugatan hukum Terminal Giwangan itu faktor luar secara administrasi. Sekarang masuk tahap banding dan kami menunggu hasilnya," tutur Titik.

Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati mengatakan, tahun ini BPK memberikan tambahan paragraf penjelasan dalam LHP yang harus diselesaikan Pemkab Bantul, salah satunya utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebelumnya, PBB dipegang Kantor Pajak Pratama namun kini dipegang langsung oleh Pemkab Bantul. "Kantor Pajak Pratama ternyata meninggalkan persoalan berupa hutang. BPK kemudian merekomendasikan Pemkab Bantul agar menagih utang tersebut," tambahnya.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Pemkab Bantul menata administrasi pengelolaan aset. Saat ini, masih ada sejumlah aset senilai Rp 10 miliar yang belum terdata dengan baik.

"Mayoritas berada di lingkungan Di-

nas Kesehatan, Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) serta Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas). Buku-buku harus dicatat dan diketahui nilainya berapa karena termasuk aset, ulasnya.

"Karena WTP, tahun lalu kita dapat reward senilai Rp 24,6 miliar. Mudah-mudahan tahun ini dapat lagi, ujarnya

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, Sleman telah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran aparat Pemkab Sleman yang telah bekerja keras dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan segera Pemkab Sleman akan menindaklanjuti hasil dari LHP BPK ini," tutur Sri Purnomo.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, dirinya merasa lega setelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Untuk Kulonprogo paragraf penjelasan yakni meningkatkan kartu inventaris ruangan (KIR) dan kartu inventaris barang (KIB).

"Setelah meraih opini WTP, kami akan meningkatkan perencanaan dan evaluasi agar bisa meraih nilai B yang tercermin dalam LAKIP. Kami akan fokus perbaikan dari LAKIP. Yang tidak kalah penting adalah pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Pemerintah kabupaten kota diberi waktu maksimal 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan LKPD.

(Tri/Unt/Feb)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005